

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep dan Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara agar dapat tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, mereka wajib ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan dan mengungkapkan kepentingan-kepentingan secara aktif dan bebas. Tidak harus berpengertian jelas, namun harus mempunyai berbagai sumber serta keinginan untuk melibatkan dirinya pada perjuangan politik yang diperlukan supaya preferensi mereka nantinya menjadi suatu bahan pertimbangan bagi para penguasa atau juga dengan berusaha menduduki jabatan pada pemerintahan.

Menurut Robert A. Dahl, idealnya suatu sistem demokrasi itu harus memiliki persamaan hak pilih yang bersifat mengikat dalam menentukan keputusan kolektif. Kemudian, adanya partisipasi yang efektif yaitu pada proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara kolektif semua warga negara memiliki kesempatan yang

sama. Idealnya suatu sistem demokrasi juga harus memiliki pembeberan kebenaran yaitu adanya kesamaan peluang bagi setiap warga negara dalam memberikan penilaian terhadap jalannya suatu proses politik serta pemerintahan yang berjalan secara logis. Kemudian sebagai kontrol terakhir yaitu dengan adanya sifat eksklusifitas bagi masyarakat untuk dapat menentukan agenda mana yang harus maupun tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain atau lembaga-lembaga yang dapat mewakili mereka. Yang terakhir adalah proses pencakupan yaitu dimana terliputnya masyarakat yang mencakup semua orang dewasa sesuai dengan hukum.

2.1.2 Konsep dan Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum sering dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi pada kebanyakan negara demokrasi. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat. Bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum wajib dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.

Pemilihan Umum atau bisa disingkat menjadi kata Pemilu, menurut Matori Abdul Djalil (dalam Marulak Pardede 2014, 86) adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan legitimatif, Pemilu adalah wujud asal pelaksanaan kedaulatan rakyat secara fundamental di negara demokrasi. Pemilu menjadi wahana formal untuk menghasilkan tatanan negara dan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik dan sebagai filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik.

Sistem pemilihan umum merupakan suatu cara yang dapat mengatur serta memungkinkan seorang warga negara untuk dapat memilih atau mencoblos para wakil yang dirasa dapat mewakili diri mereka sendiri. Metode ini sangat berhubungan erat dengan aturan dan prosedur untuk merubah atau mentransformasi suara ke dalam bentuk kursi dalam parlemen. Mereka sendiri pada akhirnya diartikan sebagai diri mereka masing-masing sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah entitas yang sama.

Pemilihan Umum merupakan bagian dalam mewujudkan suatu kedaulatan rakyat yang pada teknis dalam melakukannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat khusus. Namun, terlaksananya sebuah kegiatan pemilu bukanlah suatu standar dari pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri melainkan pemilu merupakan cara mendapatkan legitimasi atas kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Pada suatu sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi, pemilu dianggap menjadi jembatan antara prinsip terhadap kedaulatan rakyat dengan praktek dalam suatu pemerintahan oleh beberapa elit politik. Warga negara yang diasumsikan dewasa dan sudah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang bisa menentukan wakil-wakil yang mereka percayakan pada parlemen, termasuk untuk menjadi pucuk pimpinan pemerintahan.

Kampanye pemilihan umum adalah suatu kegiatan dimana para peserta pemilu atau pihak tertentu yang dipilih oleh peserta pemilu dapat meyakinkan pemilih dengan menjual visi, misi, program, dan juga citra diri dari peserta pemilu. Kegiatan kampanye dapat dilakukan oleh suatu partai politik atau pasangan calon partai politik yang didaftarkan kepada KPU sesuai dengan daerah pemilihannya

masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 275 yaitu Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d, f, dan h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

2.1.3 Konsep dan Teori Badan Legislatif

Badan Legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lainnya ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lainnya lagi ialah *Parliament*, yaitu suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, terlepas dari penamaannya, badan ini merupakan sebuah simbol dari rakyat yang berdaulat.

Berkembangnya gagasan kedaulatan ada di tangan rakyat membuat badan legislatif menjadi badan yang berhak untuk menyelenggarakan kedaulatan itu dengan melakukan suatu proses penentuan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-Undang. Sebagai pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat, Rousseau

tidak menyetujui adanya badan perwakilan tetapi lebih mencita-citakan suatu bentuk “demokrasi langsung” di mana rakyat dapat secara langsung merundingkan dan memutuskan hal-hal mengenai kenegaraan dan politik. Demokrasi langsung yang diinginkan oleh Rousseau dianggap oleh beberapa pihak merupakan hal yang tidak praktis dan hanya dapat dipertahankan dalam bentuk khusus dan terbatas seperti referendum dan plebisit. Dapat dikatakan bahwa dalam negara modern rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala.

Fungsi utama dari sebuah badan legislatif yaitu sebagai penentu arah kebijakan (*policy*) dan membuat perundang-undangan. Badan legislatif dapat diberikan hak inisiatif dimana hak tersebut melakukan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama di bidang keuangan atau anggaran. Berikutnya, adalah mengatur badan eksekutif dalam artian menjaga agar tindakan-tindakan badan eksekutif telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (pengawasan, kelalaian). Terakhir, Badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak untuk dapat mengatur secara khusus penyelenggaraan tugas ini (Budiardjo 2008, 322).

2.1.4 Konsep dan Teori Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik terhadap setiap individu atau warga negara dalam memahami sistem politik. Hal itu berarti bahwa sangat berperannya sosialisasi politik dalam pembentukan persepsi dan citra politik serta opini rakyat. Dalam membangun citra politik melalui

sosialisasi politik tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi dalam membangun citra diperlukan cara yang tepat melalui sosialisasi politik yang terus-menerus dalam waktu yang lama.

Sosialisasi politik (dalam Gatara dan Said 2007, 77) bahwa sosialisasi merupakan pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu dengan berbagai keterampilan termasuk ilmu pengetahuan, motif, dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau yang sedang diantisipasi sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih dipelajari.

Sosialisasi politik (dalam Budiardjo 2008, 407) bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan bagaimana sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi dan sebagainya. Melalui proses sosialisasi politik ini, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah untuk melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Seperti contoh Indonesia yang menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberlakukan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini merupakan contoh proses pelatihan yang

dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini juga memungkinkan individu untuk menerima atau menolak atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilu.

Rush dan Althoff (dalam Arifin 2015, 73) bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses, yaitu bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut dapat menentukan persepsi atau tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap berbagai gejala politik. Sosialisasi politik juga ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kultur di mana individu itu berada serta interaksi dengan pengalaman dan kepribadian individu.

Menurut Syahrial Syarbaini dkk. (2004, 73) jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi resmi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berwenang atau yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang sifatnya tidak resmi seperti dalam lingkup kekeluargaan dan pertemanan.

Sosialisasi yang sudah dilakukan dengan lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga pemerintahan disebut dengan istilah sosialisasi formal dikarenakan lembaga tersebut memiliki wewenang yang sudah didasari oleh hukum dan materi atau bahan yang disampaikan merupakan kebijakan dari pemerintah. Sedangkan, sosialisasi yang sifatnya disebut informal dilakukan tanpa secara sadar. Dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada

masyarakat, jenis sosialisasi formal merupakan jenis sosialisasi yang paling sering dipakai oleh pemerintah dalam proses sosialisasi.

Menurut Rush dan Althoff (2002, 37) berpendapat bahwa faktor berhasilnya sosialisasi politik dipengaruhi oleh:

- a. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok agama, kelompok sebaya, kelompok kerja, dan media massa. Agen sosialisasi politik yang juga memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.
- b. Materi sosialisasi politik, yaitu yang berisi pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
- c. Mekanisme sosialisasi politik, yaitu tata aturan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu, imitasi, instruksi, dan motivasi.
- d. Pola sosialisasi politik yaitu proses yang terus berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi, yang dilakukan oleh badan atau instansi dalam melakukan proses sosialisasi.

Unsur pertama yang memengaruhi keberhasilan sosialisasi politik yaitu agen sosialisasi politik yang merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dengan baik dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Pola proses sosialisasi yang baik dan tersusun, dapat menyebarkan informasi mengenai materi sosialisasi politik dengan tepat ke sasaran sosialisasi.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang agen sosialisasi politik tidak selalu berjalan beriringan satu dengan yang lainnya, contohnya dapat diperhatikan dari apa yang telah diajarkan oleh suatu keluarga bisa saja dapat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi yang lainnya. Tetapi orang yang

menerima pesan tersebut dapat mempelajarinya dari kelompok-kelompok lain maupun media massa. Materi sosialisasi politik harus mengandung unsur peran. Peran materi sosialisasi harus mengandung peran yang berpengetahuan.

Secara mendasar, pengetahuan bersifat faktual dan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap, begitu juga sebaliknya. Pengetahuan dapat mendukung suatu nilai khusus atau suatu sikap setelah nilai dan sikap terbentuk. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap, akan tetapi sikap-sikap dapat mendahului nilai-nilai, khususnya yang berlangsung pada dasar sosialisasi politik, nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi; terutama agama, tetapi termasuk juga ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya.
 2. Prestasi; ketekunan, pencapaian atau perolehan, ganjaran-ganjaran material, mobilitas sosial.
 3. Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
 4. Penyesuaian diri; bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketentraman.
 5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
 6. Politik; sikap-sikap dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan.
- (Syarbaini dkk. 2004, 71)

Tradisi, prestasi, pribadi, penyesuaian diri, intelektual dan politik merupakan nilai penting dalam penentuan reaksi berlangsungnya dasar sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik sangat terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki setiap masyarakat dikarenakan nilai-nilai tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap sikap masyarakat akan hal yang muncul di lingkungannya.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff (dalam Basri 2011, 91) menyuratkan terdapat tiga cara, yaitu:

1. Imitasi, melalui imitasi seorang individu meniru tingkah laku individu lainnya.
2. Instruksi, melalui instruksi seorang individu diberitahu orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa.
3. Motivasi, melalui cara ini individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain.

Berdasarkan pernyataan Rush dan Althoff, cara yang lebih cocok diterapkan untuk masa kanak-kanak atau pada masa awal adalah cara imitasi. Cara instruksi lebih banyak dilakukan pada proses belajar formal. Motivasi lebih banyak diidentifikasi dengan pengalaman.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori dari Rush dan Althoff (2002, 37) sebagai pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan empat unsur dari teori Rush dan Althoff (2002, 37) yaitu unsur Agen Sosialisasi Politik, Materi Sosialisasi Politik, Mekanisme Sosialisasi Politik, dan Pola Sosialisasi Politik.

2.1.5 Konsep dan Teori Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan masyarakat dan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Lahirnya partai politik mempunyai sejarah yang cukup panjang dan bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan organisasi negara.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Menurut Pamungkas, partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan tersebut dapat diperoleh melalui keikutsertaan pada pemilihan umum. (Pamungkas 2011, 5)

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo 2008, 404) menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil kepada anggota partainya. Partai politik merupakan sekelompok terorganisir yang mempunyai tujuan untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan politik.

Menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties* (dalam Budiardjo 2008, 404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha ingin menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut R. H. Soltau (dalam Labolo dan Teguh 2015, 12) bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, yang bertujuan mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sekelompok yang terorganisir sebagai unit politik yang menggunakan hak suaranya untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum.

Partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam Labolo dan Teguh 2015, 13).

Menurut fungsinya dalam UU No. 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 tentang partai politik, memiliki fungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui, mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Keberadaan partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa adanya peran dari partai politik, kecuali sistem politik yang menganut otoritarian atau sistem kekuasaan tradisional, itulah bukti betapa sangat pentingnya partai politik. Menurut Ware A. pada kehidupan fungsi primer partai politik artinya bersaing guna memperoleh suara serta memenangkan suatu pemilihan umum, mengagregasikan berbagai macam kepentingan masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk pada pemerintahan.

Partai politik dalam negara demokratis menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Di dalam masyarakat yang kompleks, begitu banyak pendapat serta aspirasi yang berkembang. Pendapat serta aspirasi seseorang atau suatu kelompok haruslah ditampung dan digabung, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabungkan, pendapat serta

aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih tersusun, proses ini dinamakan perumusan kepentingan.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Fungsi sosialisasi politik partai yaitu upaya menciptakan citra atau image partai yang dimana tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih tinggi lagi nilainya apabila partai politik menjalankan fungsi sosialisasi yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan mengutamakan kepentingan nasional.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi rekrutmen politik erat kaitannya dengan seleksi kepemimpinan. Setiap partai butuh kader-kader yang berkompetensi dan berkualitas, karena kader yang berkompetensi dan berkualitas dapat menjadikan partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, maka partai tidak akan kesulitan menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik dalam masyarakat selalu ada, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan tentu menyimpan potensi konflik. Keanekaragaman yang terjadi di negara yang menganut paham

demokrasi, menganggap hal yang wajar terhadap persaingan dan perbedaan pendapat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam negara yang heterogen juga memiliki potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sinilah peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau dapat mengatur sedemikian rupa sehingga dampak negatifnya dapat ditekan sekecil mungkin.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik dapat digunakan sebagai alat untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki berbakat untuk dapat turut aktif dalam suatu kegiatan politik sebagai anggota dari sebuah partai (kader partai-pen). Dengan demikian, partai politik dapat turut ikut menyebarluaskan partisipasi dalam suatu kegiatan politik. Salah satu cara yang digunakan ialah dengan menggunakan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Hal ini juga dilakukan guna menarik golongan muda untuk dapat dididik menjadi seorang kader dapat menggantikan pimpinannya yang lama yang di masa yang akan datang. (dalam Gatara dan Dzulkiah 2007, 228)

2.1.6 Faktor-faktor yang dapat menghambat dan memengaruhi pelaksanaan dari suatu fungsi sosialisasi politik yang belum berjalan optimal.

Proses sosialisasi politik dapat memengaruhi suatu hal dalam kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. Jika suatu proses sosialisasi politik agal untuk dapat dijalankan, maka hal ini dapat mengakibatkan situasi politik yang tidak

seimbang dalam suatu negara. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari banyak faktor penting bagi setiap individual ataupun kelompok dimana mereka berada.

Rush dan Althoff (2002, 37) berpendapat bahwa terdapat banyak unsur kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan dari fungsi suatu sosialisasi politik yang belum dapat berjalan secara maksimal antara lain:

- a. Kendala pola sosialisasi politik, adalah tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politik. Bagaimana pengurus partai sebagai agen sosialisasi partai politik dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas terutama yang menjadi tujuan besarnya. Jika pola-pola ini terhambat, maka masyarakat sebagai sasaran utama pun dapat menjadi kurang simpatik untuk memilih partai tersebut.
- b. Hambatan sosial ekonomi, yaitu kurangnya sumber-sumber aspek keuangan yang memadai untuk membangun suatu organisasi politik dan rendahnya ilmu pengetahuan terkait politik yang mengakibatkan beban yang berat bagi partai tersebut.
- c. Kendala sistem politik, yaitu keseimbangan dalam suatu partai politik dapat berubah sehingga sistem politik dalam sebuah partai politik menjadi lebih dinamis daripada statis.

Pengaruh pada faktor keseimbangan ini tidak lepas dari adanya pengaruh dari lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal* yang dapat membuat keseimbangan kekuatan antara struktur formal dan informal dapat berubah.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan menunjukkan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan, maka Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lainnya terhadap tema skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Yuliana (2018) dengan judul skripsi “Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Bengkayang pada Pemilu Legislatif 2014”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Mengapa Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi politiknya belum berjalan secara optimal? Salah satu faktornya adalah letak geografis yang jauh antara kampus dari para kader dan tidak adanya kader yang tergabung dalam kelompok agama Muslim di Kabupaten Bengkayang. Adapun sasaran dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa suatu proses pelaksanaan sosialisasi politik pada Partai Bulan Bintang (PBB) guna meningkatkan elektabilitas partai di Kabupaten Bengkayang. Kemudian teori yang digunakan adalah teori dari Rush dan Althoff (2002: 37) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh : a) Agen sosialisasi politik, yang dapat berasal dari kalangan keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu dengan adanya keberadaan suatu kelompok yang berkepentingan dan organisasi kemasyarakatan dapat memberi pengaruh sehingga menjadi agen dari sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat dalam berpolitik, b) Materi sosialisasi politik, yaitu ilmu pengetahuan terkait politik, nilai-nilai politik dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat, c) Mekanisme sosialisasi politik, dapat dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu, imitasi, instruksi dan

motivasi, d) Pola sosialisasi politik merupakan proses yang terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi yang terdiri dari badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi dan partai politik yang menjadi objek penelitian. Dan yang menjadi persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai pelaksanaan fungsi sosialisasi politik, di mana hasil sosialisasi politik yang dilakukan belum sesuai dengan harapan dari partai tersebut.

2. Yogie Andrean (2017) dengan judul jurnal “Sosialisasi Politik Partai Bulan Bintang (PBB) di Kecamatan Pontianak Kota pada Pemilihan Umum Legislatif 2014”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Mengapa Partai Bulan Bintang (PBB) di Kecamatan Pontianak Kota dalam pelaksanaan fungsi sosialisasinya belum berjalan secara optimal? Salah satu faktor penghambat sosialisasi politik Partai Bulan Bintang yang tidak berjalan secara optimal dipengaruhi oleh terhambatnya suatu pola sosialisasi politik. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat menghambat suatu proses sosialisasi politik pada partai PBB di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pemilihan Umum Legislatif

yang dilaksanakan pada tahun 2014 sehingga belum optimal. Teori yang digunakan adalah teori dari Rush dan Althoff yaitu terdapat tiga faktor penghambat yang menyebabkan sosialisasi politik dapat terhambat yaitu, kendala yang terjadi pada pola sosialisasi politik, kendala pada kegiatan sosial ekonomi, serta kendala yang terjadi pada sistem politik. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada teori yang digunakan, lokasi, dan partai politik yang menjadi objek penelitian. Dan yang menjadi persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai pelaksanaan fungsi sosialisasi politik, di mana hasil sosialisasi politik yang dilakukan belum sesuai dengan harapan dari partai tersebut.

2.3 Alur Pikir Penelitian

Pemilihan judul “Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Demokrat di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilu Legislatif 2019” bermula dari fenomena masalah turunnya perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pontianak Timur dan rendahnya jumlah suara Partai Demokrat di Kecamatan Pontianak Timur pada Pemilu Legislatif 2019. Peran partai politik yakni Partai Demokrat dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik untuk memberikan

pendidikan politik melalui sosialisasi politik kepada masyarakat guna meningkatkan elektabilitas partai politik itu sendiri.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik terhadap setiap individu atau warga negara dalam memahami sistem politik. Hal itu berarti bahwa sangat berperannya sosialisasi politik dalam pembentukan persepsi dan citra politik serta opini rakyat. Dalam membangun citra politik melalui sosialisasi politik tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi dalam membangun citra diperlukan cara yang tepat melalui sosialisasi politik yang terus-menerus dalam waktu yang lama.

Rush dan Althoff (2002: 37) berpendapat bahwa faktor berhasilnya sosialisasi politik dipengaruhi oleh:

- a. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok agama, kelompok sebaya, kelompok kerja, dan media massa. Agen sosialisasi politik yang juga memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.
- b. Materi sosialisasi politik, yaitu yang berisi ilmu pengetahuan politik, nilai-nilai politik dan sikap-sikap politik dalam hidup bermasyarakat.
- c. Mekanisme sosialisasi politik, yaitu tata aturan yang dapat dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu, imitasi, instruksi dan motivasi.
- d. Pola sosialisasi politik yaitu proses yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna mengetahui proses sosialisasi yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi dalam melakukan proses sosialisasi politik.

Unsur pertama yang memengaruhi keberhasilan sosialisasi politik yaitu agen sosialisasi politik yang merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut

ditentukan oleh mekanisme yang dilakukan secara terencana, dieksekusi dengan baik dan tergambar dalam pola proses sosialisasi yang baik. Pola proses sosialisasi yang baik dan tersusun, dapat menyebarkan informasi mengenai materi sosialisasi politik dengan tepat ke sasaran sosialisasi.

Rush dan Althoff (2002, 37) juga mengemukakan beberapa unsur kendala yang memengaruhi pelaksanaan fungsi sosialisasi politik belum berjalan secara optimal antara lain:

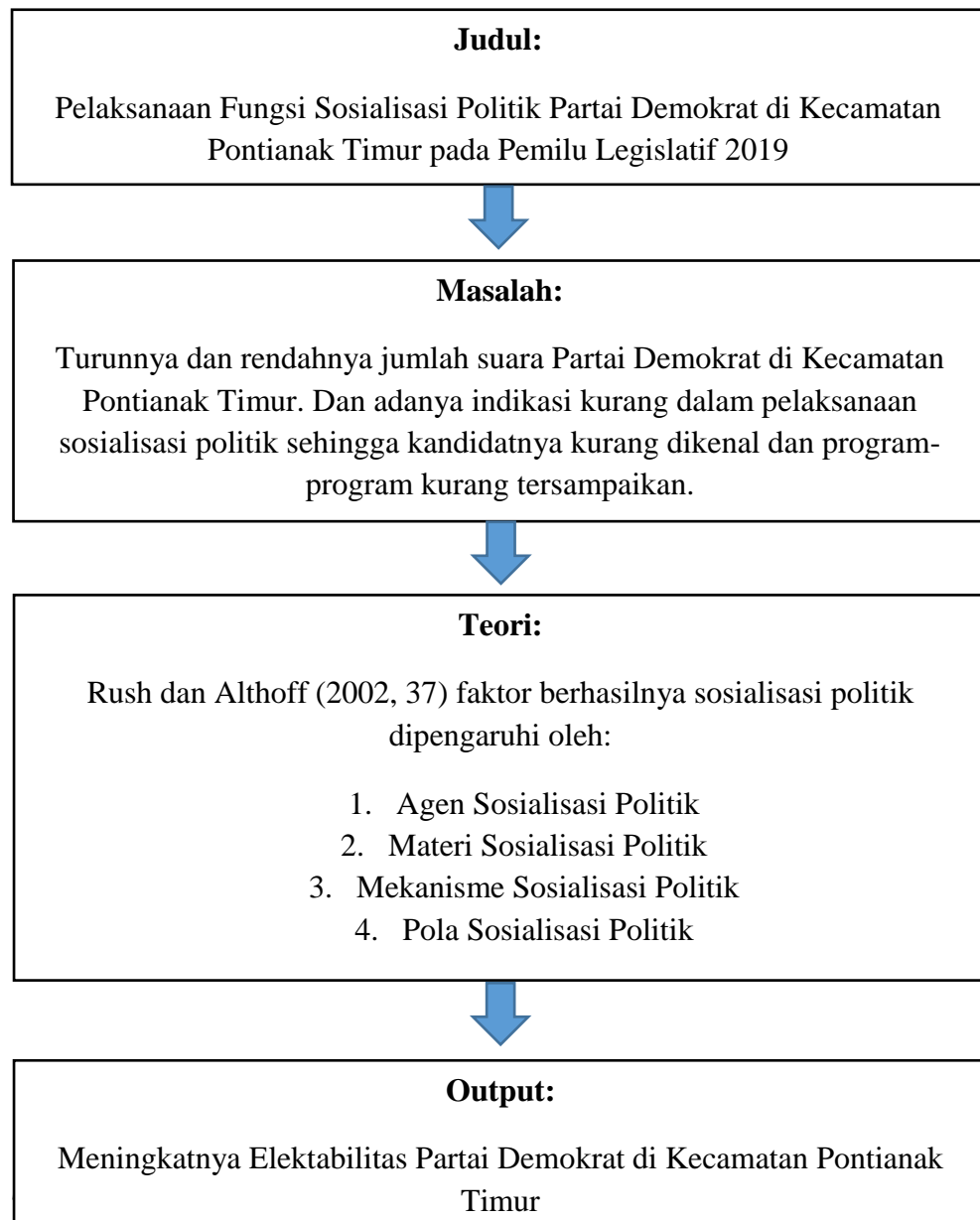
- a. Kendala pola sosialisasi politik, adalah tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politik. Bagaimana pengurus partai sebagai agen sosialisasi partai politik dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas terutama yang menjadi tujuan besarnya. Jika pola-pola ini terhambat, maka masyarakat sebagai sasaran utama pun dapat menjadi kurang simpatik untuk memilih partai tersebut.
- b. Hambatan sosial ekonomi, yaitu kurangnya sumber-sumber aspek keuangan yang memadai untuk membangun suatu organisasi politik dan rendahnya ilmu pengetahuan terkait politik yang mengakibatkan beban yang berat bagi partai tersebut.
- c. Kendala sistem politik, yaitu keseimbangan dalam suatu partai politik dapat berubah sehingga sistem politik dalam sebuah partai politik menjadi lebih dinamis daripada statis.

Peneliti menggunakan teori dari Rush dan Althoff (2002, 37) sebagai pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan empat unsur dari teori Rush dan Althoff (2002, 37) yaitu unsur Agen Sosialisasi Politik, Materi Sosialisasi Politik, Mekanisme Sosialisasi Politik, dan Pola Sosialisasi Politik.

Adapun output dari Penelitian ini yaitu Meningkatnya Elektabilitas Partai Demokrat di Kecamatan Pontianak Timur. Untuk memperjelas kerangka pikir yang

disusun oleh peneliti guna membahas persoalan yang ada, maka berikut adalah gambar dari kerangka pikir penelitian tersebut, antara lain:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2021

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah digambarkan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana peran pengurus sebagai agen sosialisasi partai politik dapat mensosialisasikan partainya yaitu Partai Demokrat?
2. Bagaimana materi sosialisasi politik yang diberikan oleh Partai Demokrat dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya?
3. Bagaimana mekanisme sosialisasi politik yang ditentukan oleh Partai Demokrat dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya?
4. Bagaimana pola sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya?